

**EVALUASI PELAKSANAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
(SDGs) DESA DI GAMpong PAYA PEUNAGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana Administrasi Negara

oleh

**ZULFA YULISMA**

**1805905010013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**MEULABOH – ACEH BARAT**

**2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 29 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : **Zulfa Yulisma**  
NIM : **1805905010013**

Dengan judul: **Evaluasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)  
Desa Di Gampong Paya Peunaga**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

**Dr. Ikhsan, M.I.P**  
**NIDN.0015019001**

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



**Basri, SH., MH**  
**NIP.19630713199110210**

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara,



**Safrida, S.Sos., M.A.P**  
**NIP.19900512201903202**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 29 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : **Zulfa Yulisma**  
NIM : **1805905010013**

Dengan judul: **Evaluasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)  
Desa Di Gampong Paya Peunaga**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 29 Juni 2022.

Menyetujui,

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Ikhsan, M.I.P
2. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, M.Si
3. Anggota : Agatha Debby Reiza Macella, S.A.P., M. Si

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara,  
  
**Safrida, S.Sos., M.A.P**  
NIP. 19900512201903202



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Yulisma

Nim : 1805905010013

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 29 Juni 2022

saya yang membuat pernyataan



Zulfa Yulisma  
NIM 1805905010013

## KATA PENGANTAR

Dengan menyatakan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**EVALUASI PELAKSANAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DESA DI GAMPONG PAYA PEUNAGA**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, motivasi, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayahanda Alm Rusli dan Nyak Ali dan Ibunda Hasma yang penulis cintai terima kasih penulis ucapkan, yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabaran yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan untuk kedua orang tua.
2. Bapak Dr. Ikhsan, M.I.P, selaku Dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta sarana yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5. Ibu Safrida,S.sos., M.AP, dan ibu Agatha Debby Macella, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si dan Ibu Agatha Debby Macella, M.Si ,selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini.
7. Seluruh Staff pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku umar.
8. Sahabatku, Adian Feri Sartika, Sela Dasmita, Intan Sawani, Intan Ramadhan, Julita, Mardiana, Aja Maulizar, dan Zul Fadli Maha yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara khususnya kepada angkatan 2018 yang penulis bangakan.

Dan akhirnya terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Skripsi Tugas Akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal' Alamin.

Meulaboh, 03 November 2021,

Penulis,

(Zulfa Yulisma)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the evaluation of the implementation of the sustainable development goals (SDGs) in paya peunaga village. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, the author uses the method of observation, interview, and documentation. The result of this study indicate that the evaluation of the implementation of the sustainable development goals (SDGs) in paya peunaga village has been carried out well, as evidenced by the fulfillment of all indicators of success in evaluating the implementation of sustainable development goals (SDGs) in paya peunaga village.*

*Keyword : Evaluation, Sustainable Development Goals (SDGs)*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi pelaksanaan *sustainable Development Goals* (SDGs) desa Paya Peunaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan *sustainable development goals* (SDGs) desa Paya Peunaga sudah terlaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya semua indikator keberhasilan evaluasi pelaksanaan *sustainable development goals* (SDGs) desa Paya Peunaga.

Kata Kunci : *Evaluasi, Sustaibale Development Goals* (SDGs)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBARAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>LEMBARAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	13
2.2.1 Definisi SDGs Desa .....	13
2.2.2 Tujuan SDGs Desa.....	14
2.2.3 Desa Tanpa Kemiskinan .....	15
2.2.4 Desa Tanpa Kelaparan .....	17
2.3 Teori Evaluasi .....	18
2.3.1 Fungsi Evaluasi.....	21
2.3.2 Indikator Evaluasi .....	22
2.4 Kerangka Berfikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Metodologi Penelitian.....	25
3.2 Sumber Data.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Informan .....	26
Tabel 3.1 .....	27
3.5 Instrumen Penelitian .....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	27
3.7 Uji Kredibilitas Data .....	27
3.8 Lokasi Penelitian.....	28
Tabel 3.2 .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Letak Geografis Gampong.....	32
4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa .....	34

4.3 Struktur Organisasi Gampong.....	37
4.3.1 Struktur Organisasi Gampong Paya Peunaga .....	37
4.4 Hasil Penelitian .....	38
4.4.1 Efektivitas .....	41
4.4.2 Kecukupan .....	43
4.4.3 Pemerataan.....	44
4.4.4 Responsivitas .....	46
4.4.5 Ketetapan .....	47
<b>BAB V Pembahasan.....</b>	<b>50</b>
5.1 Pelaksanaan Program SDGs Desa di Gampong Paya Peunaga.....	50
5.2 Hasil Evaluasi dan Solusi dari Pelaksanaan Program SDGs Desa di Desa Drien Rampak dan Desa Paya Peunaga .....	54
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
6.1 Kesimpulan .....	64
6.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kata-kata *Sustainable Development Goals* disingkat menjadi SDGs. SDGs desa ini juga merupakan role suatu pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, antara lain : “Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa kesetaraan gender, desa layak bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif”. *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa yang terakhir ini merupakan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, tujuan dari SDGs Desa adalah

tambahan tujuan pembangunan yang sangat khas untuk konteks desa di Indonesia yaitu sebagai upaya untuk mengedepankan kearifan lokal desa yang mampu mengkolaborasikan adat dan kebiasaan setempat dengan proses-proses pembangunan, hasil, manfaat dan dampaknya sehingga menjadi perubahan desa. Kemudian terdapat argumentasi-argumentasi mengenai urgensi pengaruh keutamaan SDGs Desa dalam SDGs. Selain itu, terdapat juga semangat optimisme dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara sadar, aktif, dan kolaboratif dalam mewujudkan SDGs Desa 2030.

Kelembagaan Kementerian Desa PDTT 13 Nomor 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Seluruh belanja dana desa wajib digunakan untuk menjalankan SDGs Desa. Panitia sosialisasi regulasi ini memasukkan buku SDGs Desa sebagai bagian acara. Kelembagaan Kementerian Desa PDTT dirancah ulang sehingga berfungsi mencapai tiap-tiap tujuan SDGs Desa. Koordinasi kelembagaan sampai ke desa dikuatkan melalui pelatihan pendamping desa. Kepala desa dan warga sendiri difasilitasi berkomunikasi, berdiskusi, bahkan berdebat langsung dengan Kementerian Desa PDTT, yang diwakili anggota Tim Sapa Desa.

*Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* merupakan pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini ditetapkan, semua masyarakat desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak bisa jika ada yang terlewatkan. Serta, kemajuan yang tidak akan bisa berhenti, tetapi kemajuan yang akan berkelanjutan untuk penerus yang akan mendatang untuk mewujudkan “desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, berenergi bersih dan terbarukan,

serta inovasi sesuai kebutuhan”. Masyarakat yang sehat dan makmur, mendapatkan pendidikan yang bagus, wanita-wanita juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan sebuah desa, dapat menumbuhkan ekonomi yang merata, memproduksi akan sadar lingkungan. Tinggal disebuah desa yang sangat aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli lingkungan laut dan darat, damai dan berkeadilan, dan bermitra membangun sebuah desa.

Dalam menilai sebuah pembangunan berkelanjutan maka di terapkan sebuah prinsip yang berkelanjutan untuk dapat dipastikan sudah sampai mana tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan keberlanjutan suatu wilayah. Kemudian untuk membangun sebuah pembangunan baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan , yang mana seharusnya tidak hanya bertumpu pada pencapaian sebuah pertumbuhan di perekonomian saja, akan tetapi juga harus didasarkan kepada nilai-nilai dalam sebuah pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek (Ulrich dan Hall, 2000).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa memiliki 18 tujuan. Dari 18 tujuan SDGs Desa tersebut maka peneliti mengfokuskan kepada dua tujuan SDGs Desa yaitu: Desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dimana pada era percepatan globalisasi dan 4.0 sangat penting untuk dilihat bagaimana pemerintah desa untuk mengatasi terjadinya desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, dimana industri dan teknologi semakin canggih, sehingga memacu kita untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, pembangunan dan kesetabilan kualitas lingkungan

hidup. Selain daripada itu, alasan lain yang memperkuat penulis memfokuskan pada dua tujuan tersebut adalah data Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan bahwa kabupaten tersebut masuk dalam kategori daerah miskin. Data BPS menunjukkan pada tahun 2016 data kemiskinan Kabupaten Aceh Barat sebesar 20,38% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 18,34%.



**Gambar 1.1**

Data statistik angka kemiskinan masyarakat Aceh Barat tahun 2012-2020  
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, n.d.)

Desa tanpa kemiskinan merupakan masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan yang dibawah rata-rata maka akan dikatakan sebagai masyarakat yang tidak mampu (analisa keselarasan SDGs dngan program pembangunan). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryandi (2018) desa kemiskinan adalah suatu keadaan kehidupan dimana yang terdapat berbagai jumlah warga yang tidak mampu untuk memperoleh sumber daya yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal masyarakat yang hidup dibawah tingkat kebutuhan minimal tersebut (Pangestu, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Aceh masih bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Aceh kini berjumlah 834 ribu orang atau 15,33%. Dalam data dirilis BPS Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh periode September 2020 hingga Maret 2021 mengalami penurunan secara persentase dari 15,43% menjadi 15,33%. Namun, secara angka masyarakat miskin di Aceh itu bertambah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Hal itu karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban di Meulaboh, Jumat, mengatakan presentase penduduk miskin di daerah itu pada 2019 sebesar 18,79 persen. Jumlah penduduk miskin pada 2019 sebanyak 39.290 jiwa, turun menjadi 39.060 jiwa pada 2020. Artinya pada penurunan warga miskin sebanyak 230 jiwa.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dimulai dari daerah kota dan daerah pedesaan, bertambahnya angka kemiskinan sering terjadi di daerah pedesaan karena di desa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pendapatan perkapita di atas rata-rata. Pemerintah juga berusaha untuk membantu perekonomian masyarakat di desa itu dengan cara menyalurkan bantuan-bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi akan terjadinya kemiskinan dan kelaparan.

Desa tanpa kelaparan merupakan desa yang memiliki tujuan dengan tidak terjadinya warga yang merasakan kelaparan di wilayah tersebut, dapat memperbaiki imun tubuh yang bagus, serta dapat di promosikan lahan

perkebunan yang akan berkelanjutan. Dan kata-kata kelaparan yang dimaksud adalah keadaan yang kekurangan asupan gizi dalam tubuh seseorang, serta berkurangnya jumlah asupan gizi yang terdapat dalam tubuh seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan daya tubuh seseorang supaya dapat beraktivitas serta bisa hidup sehat (Fan dan Polman, 2014), arti dari kelaparan adalah sebagai penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi, makanan yang dikonsumsi dan energi dalam tubuh seseorang (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020), (Surya, 2019). Desa tanpa kelaparan dan desa tanpa kemiskinan ini memiliki keterkaitan, jika angka kemiskinan di desa tersebut menurun maka desa tanpa kelaparan juga bisa diatasi oleh pemerintah desa.

Memahami lebih dalam tentang Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, beberapa penelitian terdahulu sudah menjabarkan tentang pelaksanaan SDGs Desa, tetapi dengan perspektif yang berbeda yang menyangkut Pelaksanaan SDGs Desa diantaranya : Partisipasi masyarakat dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terlihat dari keterlibatan mereka pada usaha-usaha pariwisata yang dijalankan oleh Pokdarwis Capung alas. Pokdarwis Capung Alas mengelola potensi wisata melalui usaha pariwisata melalui divisi di Bumdes meliputi unit usaha, yaitu humas, marketing, live in dan cafe sawah. Keberhasilan pengelolaan terlihat dari kunjungan wisatawan dan pendapatan desa yang meningkat signifikan (Ira & Muhamad, 2020). Sebagian besarnya dari aktifitas sektor pertanian berada di pedesaan yang mana dengan adanya lahan pertanian maka masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara bercocok tanam dan dapat

mengurangi terjadinya Desa Tanpa Kelaparan (Arham et al., 2019). Mendeskripsikan keterlibatan warga Negara di Desa Sompang Kolang dalam pembangunan ini dibidang ekonomi melalui program produksi gula aren untuk mencegah terjadinya Desa Tanpa Kemiskinan (Wadu et al., 2020). Menggambarkan serta menganalisa intervensi SDGs dalam penanganan ataupun penanggulangan kemiskinan terhadap warga yang bekerja sebagai nelayan dan bermukiman di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar (Wadu et al., 2020). Kegiatan yang mengacu pada kondisi Desa Hutada dimana yang mempunyai masalah lingkungan yang terutamanya adalah masalah sampah, stunting, dan banjir (Yunginger & Dako, n.d.)

Berdasarkan masalah diatas, maka pelaksanaan SDGs Desa sangat penting untuk dilaksanakan di desa agar bisa mencegah terjadinya desa tanpa kemiskinan dan desa kelaparan. Penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Paya Peunaga, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena desa paya peunaga telah menjalankan program SDGs Desa, dan menurut hasil observasi awal yang telah penulis lakukan di desa paya peunaga penulis mengetahui bahwa dari 1835 rumah tangga tercatat ada 656 yang termasuk kedalam rumah tangga miskin, data ini penulis dapatkan dari hasil observasi awal dari kantor desa Paya Peunaga. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Paya Peunaga yang berfokus pada pelaksanaan SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Oleh karenanya, judul penelitian yang penulis angkat adalah **“EVALUASI PELAKSANAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI DESA PAYA PEUNAGA**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs. Pemerintahan desa sangat penting dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* jadi rumusan masalah ini ditetapkan pertanyaan yaitu : Bagaimanakah Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Gampong Paya Peunaga ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Paya Peunaga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber yang terkait dalam Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis**

Manfaat Penelitian ini secara praktis dapat memberikan referensi terhadap Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* agar berjalan dengan baik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variable penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari metodologi penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrument penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Di Paya Peunaga.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh Ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Terkait penelitian Evaluasi Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebelumnya sudah diteliti namun, dengan perspektif yang berbeda maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu, sebagai bahan referensi dalam memudahkan penyusunan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyarini S. Ira', Muhammad (2020) yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat lewat kontribusi peran dan kegiatan mulai penyusunan, perencanaan, sampai implementasi program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terlihat dari keterlibatan mereka pada usaha-usaha pariwisata yang dijalankan oleh Pokdarwis Capung alas. Pokdarwis Capung Alas mengelola potensi wisata melalui usaha pariwisata melalui divisi di Bumdes meliputi unit usaha, yaitu humas, marketing, live in dan cafe sawah. Keberhasilan pengelolaan terlihat dari kunjungan wisatawan dan pendapatan desa yang meningkat signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif deskriptif serta wawancara mendalam (Ira & Muhamad, 2020)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Arham, Sofyan Sjaf, dan Dudung Darusman berjudul Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi kasus Desa

Sukadamai Kabupaten Bogor). Dari hasil penelitian tersebut adalah sebagian besarnya dari aktifitas sektor pertanian berada di pedesaan yang mana dengan adanya lahan pertanian maka masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara bercocok tanam dan dapat mengurangi terjadinya Desa Tanpa Kelaparan. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui penggunaan lahan tersebut secara nyata, daya dukung lahan pertanian, serta mendalami arahan perencanaan pembangunan lahan pertanian yang berkelanjutan di Desa Sukadamai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan spasial berupa citra desa yang diperoleh dari inovasi teknologi drone (Arham et al., 2019).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ludovikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay, dan Stanislaus Bandut yang berjudul Keterlibatan Warga Negara Di Desa Sompang Kolang Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi Dengan Memproduksi Gula Aren. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan warga Negara di Desa Sompang Kolang dalam pembangunan ini dibidang ekonomi melalui program produksi gula aren untuk mencegah terjadinya Desa Tanpa Kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat menunjukkan bentuk keterlibatan warga Negara di Desa Sompang Kolang dalam pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi melalui produksi gula aren dalam dua tahap penting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif (Wadu et al., 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Latief, Hasbi, Sultan, Arsyad Genda, dan Pasmudir yang berjudul *Intervensi SDGs Terhadap Penanganan Kemiskinan Nelayan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa intervensi SDGs dalam penanganan ataupun penanggulangan kemiskinan terhadap warga yang bekerja sebagai nelayan dan bermukim di pulau-pulau dan pesisir pantai kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian adalah studi kasus (Hasanuddin, 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raghel Yunginger, dan Amirudin Dako yang berjudul *Strategi Program Kampung Iklim Berbasis Bottom Up Participative Dalam Mendorong Pencapaian Target SDGs Desa Hutada*. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan yang mengacu pada kondisi Desa Hutada dimana yang mempunyai masalah lingkungan yang utamanya adalah masalah sampah, stunting, dan banjir. Desa Hutada menjadi salah satu penyangga untuk dapat memperpanjang umur Danau Limboto yang sangat sulit dengan masalah lingkungan. Potensi ini sangat bermanfaat untuk mengubah Desa tersebut dapat menjadi Desa Wisata dan biasa dimanfaatkan oleh warga untuk memandang alam di sekitar Danau Limboto. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membangun kesadaran masyarakat dalam membangun desa sehingga dapat meminimalisir berbagai permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode sosialisasi (Yunginger & Dako, n.d.)

Dari penelitian terdahulu diatas, tentunya tetap menghadirkan perbedaan dan persamaan pada setiap penelitian. Perbedaan penelitian disini ialah terletak pada fokus dan lokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sedangkan persamaannya adalah terdapat pada metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada Evaluasi Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Aceh Barat.

## **2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)**

### **2.2.1 Definisi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan turunan yang berasal dari peraturan Presiden Tahun 2017 Nomor 59 yaitu tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan atau SDGs Nasional”. Yang bertujuan agar SDGs Nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs Desa secara terpadu”. Maka dengan adanya suatu pembangunan yang fokus dengan didasari oleh SDGs Desa maka dapat diharapkan bisa memberikan hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi (*Evidence*) atau faktual di wilayah desa setempat. Yang kedua, dapat mempermudah intervensi Kementrian / Lembaga, Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota) serta swasta yang mendukung dalam membangun suatu desa tersebut.

*Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan “Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli lingkungan, desa peduli

pendidikan, desa peduli ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan”. SDGs desa juga merupakan *Role* pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Usaha dalam tercapainya SDGs desa pada kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 bukanlah suatu hal yang mudah, maka karena itulah, penggunaan dana desa 2021 yang di pentingkan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program kepentingan Nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun 10 SDGs yang dimaksud dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 diantaranya “Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, keterlibatan perempuan desa, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif”.

### **2.2.2 Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa**

Jika pada SDGs Nasional terdapat 17 tujuan dalam pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan. Dalam SDGs Desa terdapat satu tujuan yang ditambahkan yang mana untuk menjamin agar pembangunan Desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Namun tujuan tersebut

tidak tercantum kedalam SDGs Desa dan SDGs Nasional. Maka pada SDGs desa ditambahkan satu tujuan yaitu tujuan yang ke-18 yang membahas tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif. Adapun tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa maka yang ingin dicapai dalam 10 tahun kedepan yaitu : “ Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif” (SDGs, 2017).

### **2.2.3 Desa Tanpa Kemiskinan**

Desa tanpa kemiskinan ini adalah yang menargetkan pada tahun 2030 yang akan datang kemiskinan di desa harus bisa mencapai 0 persen. Bisa diartikan bahwa pada tahun 2030, penduduk miskin di desa harus berkurang. Agar dapat tercapainya tujuan itu maka diperlukan peraturan yang harus diambil serta dilaksanakan secara bersamaan, dalam rangka pencapaian suatu tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Misalnya seperti, untuk

meningkatkan hasil pendapatan masyarakat yang kurang mampu, mampu menjamin akses terhadap pelayanan awal serta bisa melindungi semua warga dari segala macam bencana.

Pada masa sekarang ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan di semua Negara yang ada di Dunia. Maka oleh karena itu, perencanaan dari SDGs Desa merupakan agar dapat menghapuskan kemiskinan di Dunia pada tahun 2030 mendatang. Pada “*Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*”, yaitu dikatakan tujuan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Agar dapat tercapainya target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030 mendatang, maka ada beberapa sasaran yang harus dicapainya di suatu desa. Diantara lain yaitu : “sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan, penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah, akses layanan pendidikan, hunian yang layak untuk penduduk pendapatan yang rendah, serta terpenuhi kebutuhan dasar lainnya” (Kementerian Desa, n.d.)

#### 2.2.4 Desa Tanpa Kelaparan

Desa tanpa kelaparan ini memiliki tujuan yang sangat penting, untuk mengingat tentang angka kelaparan yang masih sangat tinggi. Namun melalui SDGs yang secara Nasional Indonesia berupaya untuk menghilangkan kelaparan, agar dapat tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang bagus, dan bisa meningkatkan pertanian yang berkelanjutan, termasuk di Desa. Namun tidak semua manusia memiliki keringanan untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan, ada hal-hal lain yang lebih mengarahkan kepada kelaparan dan berkurangnya gizi dalam skala besar didunia. Dan ada beberapa masyarakat yang sekarang ini banyak kekurangan makanan serta tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang lebih agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kelaparan misalnya seperti kemiskinan, tidak stabilnya sistem pemerintahan, menggunakan sekitar lingkungan yang melebihi kapasitas, serta ketidakberdayaan pada anak-anak, wanita, serta lansia. Kata-kata kelaparan ini diartikan sebagai kondisi yang sangat kurangnya asupan kalori dalam tubuh seseorang, dan berkurangnya jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar bias menjalankan kehidupan yang sehat (*SDG Tanpa Kelaparan*, n.d.)

### 2.3 Teori Evaluasi

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), kata-kata evaluasi bisa diartikan sebagai penaksiran (*Appraisal*), pembangian angka (*Rating*), dan penilaian (*assesmant*). Evaluasi berkenan dengan menghasilkan pemberitahuan dengan benar serta bermanfaat bagi hasil kebijakan. Evaluasi juga dapat memberikan pemberitahuan dengan benar serta bisa di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu dengan seberapa benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, dengan seberapa benar keperluan, hasil, serta kesempatan yang telah berhasil untuk di raih melalui perilaku dari kebijakan publik: “ memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi”. Adapun yang berkenan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Dunn memaparkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik di antaranya :“Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Evaluasi implementasi kebijakan di bagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu “pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dialksanakan, dan setelah di laksanakan”. Yang di maksud evaluasi pada waktu pelaksanaan bisa di sebut dengan evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut di lakukan bisa dikatakan sebagai evaluasi kensekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi pengaruh (*outcome*) kebijakan, dan evaluasi setelah pelaksanaan di sebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan

evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn (1999) dalam Nugroho (2014) terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis, dan evaluasi semu (Nugroho, 2014).

Menurut William Dunn (1998: 608-609), evaluasi memiliki beberapa karakter yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakter yang membedakan dapat dibagi menjadi empat di antaranya:

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Oleh karena itu ketetapan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian perlu dukungan dengan bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara fakta yang disebut dengan konsekuensi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi memecahkan masalah tertentu maka dari itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan atfokatif, di arahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, di bandingkan dengan hasil masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah kegiatan kegiatan yang dilakukan rekomendasi yang mencakup premis-premis nilai, besifat prospektif dan di buat sebelum kegiatan-kegiatan dilakukan.

#### 4. Kualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas lebih, karena mereka di lihat sebagai tujuan dan sekaligus acara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada, serta bisa di anggap sebagai intrinsik (di perlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik(di perlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan lain). Nilai yang sering di tata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas ialah tentang menginformasikan yang bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi tentang kebijakan yang dapatantisipasi dan juga yang tidak dapat diantisipasi, evaluasi juga diarahkan sebagai memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Evaluasi kebijakan juga di arahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan ataupun program tertentu sudah mencapai tingkat kinerja yang sangat tinggi (ataupun rendah) bagi setiap semua individu, baik kelompok maupun masyarakat apabila adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu dari berbagai teori

diatas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan teori ini yang paling tepat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

### **2.3.1 Fungsi Evaluasi**

Evaluasi kebijakan juga sangat penting dalam menilai sebuah kebijakan publik. Karena evaluasi juga memiliki fungsi yang membuat sebuah kebijakan perlu untuk di evaluasi. William Dunn (1998: 608-609) juga mengemukakan dalam analisis kebijakan yang bahwa evaluasi juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yaitu :

1. Evaluasi memberikan informasi yang sangat benar dan juga dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, ialah seberapa jauh kebutuhan, nilai dan suatu kesempatan serta tujuan yang sudah dicapai melalui aksi publik. Selain itu evaluasi juga mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu atau suatu target tertentu sudah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari dalam target kebijakan publik. Oleh sebab itu di perjelaskan dengan mendefinisikan dan juga mengoperasikan tujuan atau target. Dalam mempertanyakan kepastian tujuan atau sasaran analisis juga dapat menggunakan alternatif sumber nilai ataupun suatu landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberikan sumbangan kepada aplikasi metode-metode suatu analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam

perumusan masalah ataupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi juga dapat menyumbang pada definisi alternative kebijakan baru ataupun revisi terhadap sebuah kebijakan dengan menunjukkan yang bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti ataupun diperbaiki.

### **2.3.2 Indikator Evaluasi**

Mernurut William Dunn (1999) ada lima Indikator Evaluasi antara lain:

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapainya tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2. Kecukupan**

Kecukupan merupakan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

#### **3. Pemerataan**

Pemeretaan merupakan bahwa kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

#### 4. Responsivitas

Responsivitas merupakan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

#### 5. Ketetapan

Ketetapan merupakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah “kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk di pecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis berusaha mengungkapkan suatu kejadian sesuai dengan kenyataan. Menurut Burhan Bungin penelitian kualitatif adalah penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, namun dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada digali sebanyak-banyaknya data mengenai sasaran penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu (Burhan Bugin ).

#### **3.2 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Burhan Bugin. Dalam peneliti ini Observasi, Wawancara, Dokumentasi itu termasuk ke sumber data primer
2. Data sekunder merupakan data kedua sesudah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat ditemukan data dari perpustakaan, Koran, dan internet.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi menurut Burhan Bungin merupakan metode pengamatan manusia dengan menggunakan mata untuk bantuan utamanya. Pengumpulan data yang telah diamati tersebut kemudian dihimpun menjadi data penelitian. Adapun penelitian ini peneliti melihat objek secara langsung, observasi dalam rencana penelitian ini adalah di desa Paya Peunaga.

#### **2. Wawancara**

Menurut (Bungin, 2013) wawancara ialah metode yang cara tanya jawab dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang di wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan ialah Pelaksanaan SDGs Desa di desa Paya Peunaga.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan dokumen yang berupa dokumen yang tertulis, yang berbentuk gambar maupun elektronik.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Penelitian ini memilih pihak-pihak yang terpengaruh dalam masalah penelitian dan orang-orang yang bisa didapat kunci informasi. Berikut beberapa orang sebagai informan :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Aparatur Desa Paya Peunaga	3 orang
2	Masyarakat Desa Paya Peunaga	4 orang

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan yang menjadi instrumen penulis ialah penulis sendiri yang mengolah seluruh proses penelitian dari awal dan akhir penelitian dengan menggunakan kuesioner dan wawancara serta berpedoman oleh pertanyaan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Peneliti menganalisis data sejak awal penelitian dan ketika pelaksanaan proses penelitian. Analisis data yaitu cara mudah untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan dalam sebuah penelitian.

### **3.7 Penguji Kredibilitas Data**

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas dengan menggunakan melalui triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan dan berbagai waktu (Sugiono;2012). Ada tiga macam triangulasi yang dimaksud yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik pengujian yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau berbagai teknik lain dalam waktu atau kondisi yang berbeda.

### **3.8 Lokasi Penelitian**

Tempat penulis melakukan penelitian di desa Paya Peunaga, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat. Adapun jadwal untuk melakukan penelitian serta segala serangkaian kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang 6 bulan sesuai dengan tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**

Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		11	12	1	2	3	4
<b>Tahap I</b>							
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Observasi Awal						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Konsultan						
5.	Perbaikan						
6.	Seminar Proposal						
7.	Perbaikan						
<b>Tahap II</b>							
8.	Penelitian Dilapangan						
9.	Pengelolaan Data						
10.	Analisis Data						
<b>Tahap III</b>							
11.	Penulisan Hasil Penelitian						
12.	Konsultan						
13.	Seminar Hasil						
14.	Perbaikan						

<b>Tahap IV</b>							
15.	Sidang						

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Paya Peunaga di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

**4.1.1 Letak Geografis Desa Paya Peunaga**

Secara geografis Gampong Paya Peunaga terletak di wilayah Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Timur : Gampong P. Rayeuk dan Gunong Kleng

Barat : Gampong Ujong Tanoh

Utara : Gampong Ujong Tanoh Darat

Selatan : Gampong Peunaga Rayeuk

Gampong Paya Peunaga terletak di wilayah Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.294 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.237 jiwa, maka jumlah total penduduk Gampong Paya Peunaga ada sebanyak 4.531 jiwa.

Tabel 4.1

Rumah Tangga Miskin Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah rumah tangga	1835
2	Jumlah rumah tangga miskin	656

*Sumber : Sekretaris Gampong Paya Peunaga, 20*

## 4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

### 1. Tugas pokok, fungsi, wewenang kepada Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan APB Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa ;
- i. Mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- m. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;

- p. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- q. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa.

2. Tugas pokok dan fungsi sekertaris Desa

- a. Sekertaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
- b. Sekertaris desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2), sekertaris desa mempunyai fungsi:
  - 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

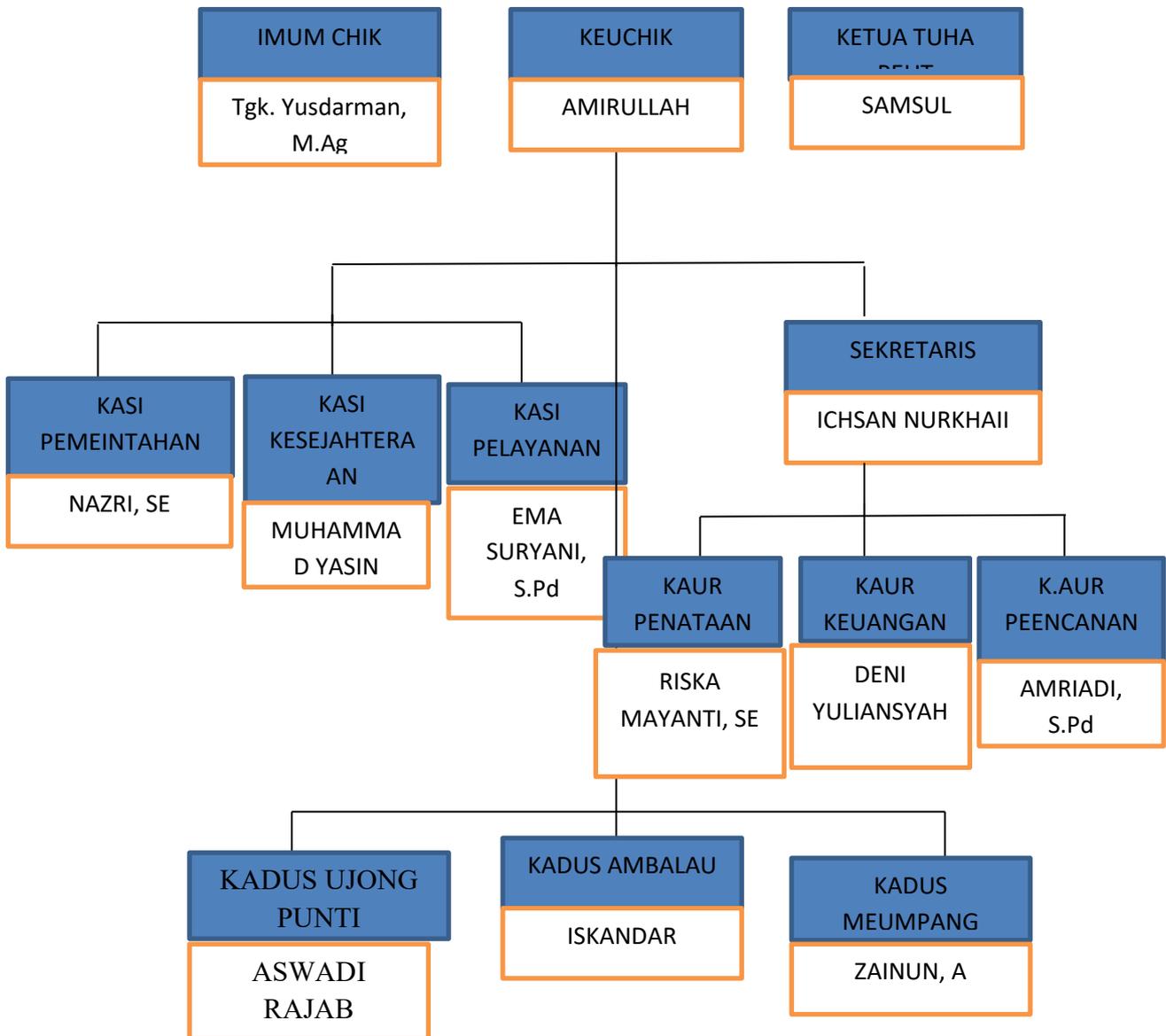
4. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi.
3. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan umum
- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
  - b. Kepala urusan umum membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
  - d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
    1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas ;
    2. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
    3. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
    4. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
    5. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
    6. Penyiapan rapat-rapat;
    7. Pengadministrasian asset desa;
    8. Pengadministrasian inventarisasi desa;

9. Pengadministrasian perjalanan dinas ;
  10. Melaksanakan pelayanan umum.
4. Tugas pokok dan fungsi kepala urusan pemerintahan
- a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan
  - b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan
  - c. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
    1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
    2. Menyusun rancangan regulasi ;
    3. Melaksanakan pembinaan masalah pertahanan;
    4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
    5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;
    6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
    7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
    8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa;
    9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
5. Tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun
- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kepala dusun memiliki fungsi:
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah;
  3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### 4.3 Struktur Organisasi Gampong

#### 4.3.1 Struktur Organisasi Gampong Paya Peunaga



*Sumber : Hasil Dari Knator Desa Paya Peunaga*

#### **4.4 Hasil Penelitian**

##### **Evaluasi Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Di Desa Paya Peunaga, Kec. Meureubo**

SDGs Desa merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan dampak percepatan pembangunan desa berkelanjutan. Upaya ini dilakukan agar pembangunan yang diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat. Namun, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dibutuhkan konsistensi dalam berbagai aksinya, salah satunya adalah dengan turut melibatkan masyarakat dalam setiap program yang dilakukan oleh pemerintah Desa (Andari, 2021:3).

Program SDGs Desa dimulai sejak tahun 2020 dan disahkan oleh Presiden Jokowi. Program ini dilakukan dengan motivasi membangun Indonesia dimulai dari Desa. Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan agar desa dibina menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Artinya, sebelum SDGs Desa ini terbentuk, desa sudah menjadi perhatian pemerintah untuk semakin dikembangkan dan diberdayakan. Desa memiliki peluang untuk berkembang dan memajukan tanah air, Indonesia. Dengan berfokus pada pengembangan desa, artinya secara langsung juga fokus dengan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, program desa perlu diperhatikan dengan seksama dalam setiap proses pelaksanaan hingga evaluasi akhir.

Oleh karena itu, di sisi lain, untuk melihat sebuah program SDGs Desa juga perlu melakukan proses evaluasi. Proses ini dilakukan dengan

tujuan agar mengetahui kondisi yang belum memadai dan belum terpantau secara merata saat program dilakukan. Di samping itu juga untuk melihat peluang-peluang lainnya untuk membantu memberantaskan persoalan masyarakat. Peluang-peluang ini dapat dibentuk dan diwujudkan dalam program selanjutnya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, berikut beberapa indikator evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program SDGs Desa, seperti:

1. Efektifitas Pelaksanaan SDGs Desa (Kemiskinan Dan Kelaparan)
2. Kecukupan Pelaksanaan SDGs Desa (Kemiskinan Dan Kelaparan)
3. Pemerataan Pelaksanaan SDGs Desa (Kemiskinan Dan Kelaparan)
4. Responsivitas Pelaksanaan SDGs Desa (Kemiskinan Dan Kelaparan)
5. Ketetapan Pelaksanaan SDGs Desa (Kemiskinan Dan Kelaparan)

Dari kelima indikator evaluasi ini telah peneliti gunakan sebagai tolak ukur perolehan data dari berbagai narasumber. Setiap narasumber memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan SDGs Desa di Paya peunaga

Setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa data terkait pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Aceh Barat,

berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan SDGs desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah dilaksanakan dan diimplementasikan dengan sangat baik. Untuk menjawab permasalahan secara lebih mendalam, maka peneliti akan menguraikan data hasil penelitian dengan menggunakan teori evaluasi yang terpecah menjadi 5 indikator evaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang telah peneliti wawancarai, diantaranya Kaur Keuangan Deni Yuliansyah Desa Paya Peunaga menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan SDGs yang dikerjakan selama ini, menurut saya, sudah sangat baik. Dengan adanya program SDGs Desa ini juga dapat membantu masyarakat pada masa covid-19 terutama dengan adanya BLT, dan dengan adanya BLT maka dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan”(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Selanjutnya, Ema Suryani selaku Kasi Pelayanan di Desa Paya Peunaga juga menyampaikan kepada penulis tentang bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan program SDGs desa, menjelaskan bahwa:

“jadi gini dek, saya melihat bahwa pelaksanaan SDGs Desa sudah baik dan kami sebagai aparat desa juga sudah melakukan yang terbaik agar SDGs Desa dapat dijalankan, dan program SDGs Desa dapat di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan terutama dalam mengatasi terjadinya kemiskinan”(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat diketahui bahwa program SDGs Desa di kedua desa, yaitu Desa Paya Peunaga telah melakukan dan menjalankan program SDGs Desa dengan baik. Pihak pemerintah desa telah berupaya sebaik dan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bagi yang membutuhkan pada desa tersebut.

Dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dan kelaparan serta memberdayakan masyarakat desa, pemerintah perlu memberikan perhatian semaksimal mungkin kepada setiap desa. Melalui program SDGs Desa ini menjadi salah satu cara terbaik untuk mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Fokusnya perlu mengerucut terlebih dahulu dengan membangun desa, sehingga ketika desa-desa sudah semakin terberdaya, secara tidak langsung Indonesia juga akan semakin maju dan berkembang.

Dibalik kesuksesan penerapan program SDGs Desa, tidak hanya dilihat dari terlaksananya sebuah program SDGs Desa ini, tetapi juga perlu adanya pemberlakuan proses monitoring dan evaluasi. Maka dari itu, dalam sub bab selanjutnya, peneliti akan menyajikan hasil wawancara para narasumber yang berkaitan dengan indikator evaluasi.

#### **4.4.1 Efektivitas**

Efektifitas merupakan tolak ukur keberhasilan atas perencanaan program yang dilaksanakan (Handayani, 1996). Efektifitas artinya melihat ketercapaian atau tingkat keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, efektifitas perlu dikontrol dengan cermat melalui berbagai tahap, seperti monitoring dan evaluasi. Biasanya, suatu program akan ditemukan datanya ketika telah dilakukan monitoring dan evaluasi akhir. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan SDGs Desa, peneliti melakukan proses wawancara dengan sejumlah narasumber. Berikut tanggapan para narasumber terkait keefektifan pelaksanaan SDGs Desa yang telah dilaksanakan di

lokasi. Pada fokus evektifitas program SDGs, peneliti mewawancarai Deni Yuliansyah selaku Kaur Keuangan Desa Paya Peunaga, menjelaskan bahwa:

“Kami selaku aparaturnya Desa Paya Peunaga sudah melaksanakan pelaksanaan program SDGs Desa di desa ini. Kami sudah menjalankan program tersebut, kami selaku aparaturnya desa juga telah berusaha agar pelaksanaan program SDGs di Desa ini berjalan dengan efektif. Dan sejauh ini udah cukup efektif dek, masyarakat yang menerima bantuan juga terbantu kehidupannya karena tiap bulan mendapatkan BLT sehingga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka, ini juga pastinya langkah yang bagus untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah adanya masyarakat yang kelaparan.” (Wawancara Pada Tanggal 04 April 2022)

Selain itu, Ema Suryani selaku Kaur Penataan Desa Paya Peunaga menjelaskan bahwa:

“Untuk saat ini udah lumayan efektif sih dek, karena masyarakat yang menerima bantuan juga terbantu kehidupannya karena tiap bulan mendapatkan BLT sehingga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka, ini juga pastinya langkah yang bagus untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah adanya masyarakat yang kelaparan.” (Wawancara Pada Tanggal 04 April 2022)

Selanjutnya, terkait perubahan dampak yang dirasakan masyarakat, Ia juga menjelaskan bahwa:

“Tentu ada bedanya dek, dari yang dulu nya masyarakat disini hanya mengandalkan penghasilan yang kadang bisa dibbilang gak cukup unuk kebutuhan sehari hari, sekarang sudah sedikit terbantu dengan adanya BLT..” (Wawancara Pada Tanggal 04 April 2022)

#### 4.4.2 Kecukupan

Kecukupan adalah indikator lain yang perlu diperhatikan saat melakukan evaluasi program kerja. Kecukupan artinya memastikan setiap tugas, setiap program berjalan sesuai dengan porsinya. Artinya, setiap program yang dijalankan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait indikator ini, berikut tanggapan para narasumber terkait kecukupan pelaksanaan SDGs Desa yang telah dilaksanakan di lokasi.

Kemudian peneliti wawancara dengan Deni Yuliansyah selaku Kaur Keuangan Desa Paya Peunaga menjelaskan tentang bagaimana cara pemerintah desa mengatasi terjadinya desa tanpa kelaparan, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk urusan pangan, masyarakat ini sudah lumayan terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan, sehingga untuk kebutuhan dapur dalam sebulan tentunya sudah cukup, dan juga bantuan itu diberikan selalu secara berkala tiap bulannya. Tapi untuk mengentaskan kemiskinan tentunya masih belum bisa dek, seperti bapak jelasin tadi bahwa dana desa itu sangat terbatas dan ada banyak keperluan rutin dan juga harus kami keluarkan dari sana dan juga masalah kemiskinan ini masalah yang kompleks dek, gabisa dilihat dari satu sisi aja, dan BLT juga tentunya tidak mampu mengentaskan kemiskinan. “(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Selanjutnya, Ema Suryani, Kepala Urusan Penataan Desa Paya Peunaga juga menjelaskan tentang bagaimana mengatasi desa tanpa kemiskinan, beliau menjelaskan bahwa:

Jadi untuk strategi menjalankan SDGs desa untuk mengatasi terjadinya kemiskinan di desa ini dek, kami masih lebih kepada pemberian bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Dalam menjalankan pelaksanaan SDGs desa sejauh ini masih program BLT saja yang kami dapat lakukan dek, karena

dana desa yang sangat terbatas, dan itupun sudah di tentukan dari pusat bahwa dana desa yang harus digunakan untuk BLT jangan sampai kurang dari 40%, padahal masih banyak tunjangan yang harus kami pikirkan.”(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan SDGs Desa di desa Paya Peunaga berlangsung dengan sangat baik. Di samping itu, pelaksanaan program ini sudah mengikuti aturan yang berlaku. Tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat tidak pernah merasa puas apa yang diberikan oleh pemerintah desa.

#### **4.4.3 Pemerataan**

Pemerataan secara sederhana diartikan sebagai aktivitas untuk menyamaratakan dan menyeragamkan suatu konsep. Ternyata, penyamarataan sering disalahgunakan untuk untuk mendeskripsikan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan seseorang. Padahal, penyamarataan kerja kaitannya dengan kesanggupan seseorang. Sehingga, ketika seseorang merasa sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan, itu yang disebut dengan penyamarataan. Penyamarataan ini secara spesifik tidak mendeskripsikan kadar kebutuhannya. Oleh karena itu, berikut tanggapan para narasumber terkait pemerataan pelaksanaan SDGs Desa yang telah dilaksanakan di lokasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang telah peneliti wawancarai, diantaranya Deni Yuliansyah selaku Kaur Keuangan Desa Paya Peunaga menjelaskan bahwa:

“Dalam menjalankan semua program yang ada di desa, salah satunya program SDGs Desa, kami sudah melibatkan masyarakat, dan memberikan bantuan secara merata kepada masyarakat. Kami pasti nya mengupayakan bantuan dapat tersalurkan dengan merata dek, akan tetapi dalam penentuan penerima kami juga harus

melakukan rapat dengan seluruh aparat dan tuha peut, dan berdasarkan kriteria yang ada, kami menentukan siapa saja masyarakat untuk menerima bantuan dan setiap tahunnya kami akan melakukan penentuan ulang. “(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Selain daripada itu, bentuk pemerataan juga dilakukan dengan mengumpulkan warga untuk sama-sama berdiskusi perihal pengentasan kemiskinan dalam hal ini penyaluran bantuan. berikut penjelasan Deni kepada penulis:

“Pastinya ikut dek, kami membahas tentang SDGs desa saat MUSREMBANG yang tentunya dalam MUSREMBANG tersebut kami mengundang masyarakat dan mendengarkan pendapat dan aspirasi mereka.” “(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Selanjutnya, Ema Suryani, Kepala Urusan Penataan Desa Paya Peunaga menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program SDGs Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah bekerja sama dengan masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat terlaksanakan dengan baik, dan pemerintah desa juga sudah memberikan secara merata bantuan-bantuan yang dapat mengatasi terjadi kemiskinan dan kelaparan.” “(Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program SDGs Desa telah dilakukan secara merata kepada seluruh masyarakat desa. Bahkan, salah satu bentuk transparansi, pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam menjalankan program SDGs Desa ini. Masyarakat diajak untuk saling bermusyawarah dan berdiskusi terlebih dahulu agar tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan. Pemerintah desa memberikan penjelasan terkait alur dan proses pelaksanaan SDGs Desa kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami dengan baik.

#### 4.4.4 Responsivitas

Responsivitas adalah suatu sikap untuk dapat mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas. Bentuk responsivitas adalah cara menyikapi setiap kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh suatu pihak dengan segera. Biasanya, responsivitas adalah berupa respon seseorang/pihak dalam menangani masalah, Misalnya, pihak pemerintah sangat siagap dan cepat tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat. Sikap seperti yang sangat dibutuhkan oleh setiap kalangan saat sedang berada pada suatu masalah. Maka dari itu, sikap responsivitas adalah salah satu indikator dalam tahap evaluasi guna melihat sejauh mana respon seseorang/pihak dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Terkait dengan sikap responsivitas di kalangan pemerintah desa Paya Peunaga berikut tanggapan para narasumber terkait responsivitas pelaksanaan SDGs Desa yang telah dilaksanakan di lokasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang peneliti wawancarai, diantaranya ada Amriadi sebagai kaur perencanaan menjelaskan bahwa:

“Kami selaku aparat desa tentu sudah berusaha dalam menjalankan sebuah program. Dari pelaksanaannya program SDGs Desa yang mana akan bermanfaat untuk masyarakat. Dan sejauh ini gak ada protes dari masyarakat dek, karena segala putusan dan ketetapan yang kami lakukan semuanya melalui musyawarah dengan seluruh aparat dan masyarakat. Tapi untuk penyaluran BLT pasti nya ada, karena banyak yang menganggap dirinya layak untuk menerima bantuan itu.” (Wawancara Pada Tanggal 23 Mei 2022)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Riska Mayanti, SE selaku Kaur Penataan Desa Paya Peunaga menjelaskan bahwa:

“Pastinya kami respon dengan baik dek, sembari kami menjelaskan kepada masyarakat tentang anggaran yang terbatas sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan, akan tetapi kami juga mendengarkan keluhan dari masyarakat tersebut yang kemudian akan kami cari solusi pemecahannya maupun menjadi pertimbangan bagi kami dalam penetapan penerima bantuan untuk tahun selanjutnya“(Wawancara Pada Tanggal 23 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon pemerintah Paya Punaga sudah dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan SDGs Desa sudah memberikan respon yang baik kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan melibatkan kehadiran masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data-data masyarakat. Masyarakat juga diberikan arahan terkait siapa saja yang layak mendapat bantuan dari pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah desa di Paya Punaga dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat.

#### **4.4.5 Ketetapan**

Terkait dengan ketetapan, yang dimaksud dengan ketetapan dalam indikator evaluasi adalah melihat apakah seseorang/pihak disebut layak untuk menjadi objek. Dalam konteks pelaksanaan SDGs Desa, indikator ketetapan merujuk pada kelayakan masyarakat terkait penerimaan pelaksanaan program SDGs Desa. Konteksnya dapat dilihat berdasarkan kelayakan seseorang mendapatkan bantuan atau program SDGs Desa yang dilaksanakan layak/sesuai tidak dengan

aturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu acuan penting untuk melihat keberhasilan dari indikator evaluasi.

Terkait dengan indikator ketetapan dan progress di kalangan masyarakat, berikut tanggapan para narasumber terkait ketetapan pelaksanaan SDGs Desa yang telah dilaksanakan di lokasi. Beberapa diantaranya sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ibu Maisarah selaku masyarakat Paya Peunaga, menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, semenjak adanya program SDGs Desa itu sangat baik yang mana dari program ini dapat mengurangi terjadinya angka kelaparan di desa ini dengan cara pembagian sembako, akan tetapi bantuan tersebut belum bisa dilihat masyarakat mana yang layak untuk mendapatkannya “(Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022)

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Yulia anggraini selaku masyarakat Paya Peunaga menyatakan bahwa:

“untuk sejauh ini yang ibu lihat, di desa paya peunaga dalam menjalankan sebuah program pasti akan mengajak semua masyarakat untuk ikut serta, guna supaya masyarakat desa ini tau apa itu SDGs desa, dan dengan hal tersebut kami sebagai masyarakat lebih mendukung aparatur desa dalam menjalankannya untuk mengatasi terjadinya kemiskinan dan kelaparan di desa paya peunaga“(Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Hasma selaku masyarakat Paya Peunaga, yang menjelaskan bahwa:  
“Jadi gini dek, kalau masalah kecukupan pangan ini semenjak adanya program BLT itu sudah sedikit membantu, karena dengan adanya program itu dapat mengurangi terjadinya kelaparan, mungkin itu tidak bisa bertahan lama, tapi setidaknya sudah membantu“(Wawancara Pada Tanggal 25 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat dari Paya Peunaga sudah mengakui bahwa program SDGs Desa sudah dilaksanakan. Namun, proses pelaksanaannya masih dapat dikatakan belum maksimal. Mereka menjelaskan

bahwa program SDGs Desa belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat secara merata.

Dengan demikian, dari setiap hasil wawancara yang sudah peneliti dapatkan, selanjutnya akan peneliti rangkum dan penelitian bahas dalam sub bagian pembahasan. Pada sub bagian ini peneliti akan membahas dari segi teori, indikator evaluasi dan dari studi literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan program SDGs Desa.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Pelaksanaan Program SDGs Desa di Desa Paya Punaga Kec. Meureubo

*Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* adalah program pemerintah Indonesia yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program SDGs Desa ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, perekonomian tumbuh secara merata dan terlibat aktif dalam pembangunan keberlanjutan.

Abdul Halim Iskandar, selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) atau yang dikenal dengan sapaan Gus Menteri menyampaikan bahwa program SDGs di Indonesia cenderung meningkat, namun realtif bergerak lambat, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih maksimal untuk mengejar pemerataan yang lebih optimal (*arahdestinasi.com*). Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan kebijakan SDGs Desa dengan 18 tujuan penting. 18 Tujuan penting ini diharapkan akan membentuk kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Berikut 18 tujuan SDGs Desa.

1	Desa tanpa kemiskinan
2	Desa tanpa kelaparan
3	Desa sehat dan sejahtera
4	Pendidikan desa berkualitas

5	Keterlibatan perempuan desa
6	Desa layak air bersih dan sanitasi
7	Desa berenergi bersih dan terbarukan
8	Pertumbuhan ekonomi desa merata
9	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10	Desa tanpa kesenjangan
11	Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
12	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13	Desa tangkap perubahan iklim
14	Desa peduli lingkungan laut
15	Desa peduli lingkungan darat
16	Desa damai berkeadilan
17	Kemitraan untuk pembangunan desa
18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

**Tabel 1. 18 Tujuan SDGs Desa**

Berdasarkan table 1 di atas diketahui bahwa Mendes PDTT, Bapak Abdul Halim Iskandar sangat berupaya untuk membangun lingkungan desa yang semakin berdaya. Lingkungan desa tidak hanya difokuskan pada pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga pada kelayakan air bersih, pemenuhan hak berkeadila, pembangunan kerjasama, dan sebagainya. dari beberapa poin 18 tujuan SDGs Desa, peneliti hanya fokus pada 2 jenis tujuan, yaitu pada desa tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Alasan penulis memfokuskan pada dua poin tersebut karena kelaparan dan kemiskinan

merupakan permasalahan serius yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Hal ini terlebih lagi data kemiskinan provinsi Aceh menduduki posisi 10 besar di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 19 disebutkan bahwa SDGs Desa adalah:

“Upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

Berdasarkan isi peraturan tersebut dapat diketahui bahwa program SDGs Desa adalah suatu upaya pemerintah Indonesia yang dibangun untuk mencapai kemakmuran Indonesia yang dimulai dari desa. Desa diberikan perhatian secara khusus, tidak hanya dalam persoalan ekonomi, tetapi juga kepedulian pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, ramah perempuan, berjejaring dan tanggap budaya. Upaya-upaya dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, masih dalam peraturan yang sama, dalam upaya pembangunan desa secara berkelanjutan, program SDGs Desa juga menyangkut dengan Penggunaan Dana Desa. Dana Desa ini ditujukan sebagai wujud pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 6

Ayat 2 dijelaskan bahwa:

“Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.
- b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
- c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif”

Selanjutnya, masih dalam peraturan yang sama, yaitu Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentangn Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 6 Ayat 3 dijelaskan bahwa:

“Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
- b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”

Berdasarkan isi dari kedua peraturan di atas dapat digarisbawahi bahwa dalam upaya memajukan pembangunan Desa sangat dibutuhkan adanya bantuan dari segi dana. Dana Desa diharapkan dapat digunakan secara bijak untuk menanggulangi dan memulihkan kerentanan dalam masyarakat. Dana

Desa diberikan dengan tujuan adanya pemerataan pada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Dana Desa juga dikururkan sebagai bagian penting untuk mengatasi permasalahan akibat Covid-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Covid-19 telah mengancam perekonomian Negara dan dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil andil untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan bantuan Dana Desa kepada setiap anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mewujudkan desa yang sehat dan sejahtera. Kemudian, tujuan lainnya adalah agar masyarakat, khususnya di desa, mendapatkan bantuan dana secara menyeluruh melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

## **5.2 Hasil Evaluasi dan Solusi dari Pelaksanaan Program SDGs Desa Paya Peunaga, Kec. Meureubo**

### **a. Efektifitas**

Efektifnya suatu program berjalan jika telah dilakukan pemantauan atau diuji dari hasil akhir program tersebut. Secara umum, yang dilihat adalah apakah suatu program diterima dan dipahami dengan baik oleh setiap objek yang disasar. Pada dasarnya, efektivitas melihat bagaimana pencapaian suatu program/organisasi/instansi dalam menjalankan pekerjaannya. Efektivitas ditinjau berdasarkan sumber dayanya, ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta proses dilakukannya suatu kegiatan. apabila pekerjaan atau kegiatan tersebut dilakukan dengan benar, maka hasil akhirnya pasti akan sangat memuaskan.

Terkait kategori untuk menilai efektif tau tidaknya suatu program, maka terdapat beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukurnya (Martani dan Lubis, 1987:55).

1. Pendekatan Sumber, yaitu mengukur melalui sumber daya yang ada, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Pendekatan proses, yaitu dengan melihat pelaksanaan program, baik secara internal maupun eksternal.
3. Pendektan sasaran, yaitu melihat keberhasilan program berdasarkan hasil *output*.

Di balik beberapa tolak ukur di atas, terdapat 5 kriteria yang harus diperhatikan dalam pengukuran efektivitas (Tangkilisan, 2005:141), di antaranya:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlababa
5. Pernercaian sumber daya alam

Dari keseluruhan tolak ukur dan kriteria di atas, peneliti melihat bahwa untuk menilai suatu program efektif atau tidak entu sangat tidak mudah. Namun, untuk menilai keefektivan suatu program juga dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan dari pemerintah desa di Desa Paya Peunaga. Secara umum peneliti melihat bahwa program SDGs Desa yang telah

dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Paya Peunaga sudah dapat dikategorikan efektif. Hal ini dikarenakan mereka telah menerapkan SDGs Desa dengan sangat baik dan berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Paya Peunaga adalah yang sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos). Jenis program ini dilakukan bermula dari pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Setiap warga desa tidak hanya merasa kesusahan untuk mengakses ruang publik karena adanya virus corona, tetapi juga mereka secara terpaksa berhenti dan diberhentikan dari tempat kerja. Sehingga, banyak anggota masyarakat yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, program BLT dan Bansos sebagai bagian dari SDGs Desa dilakukan secara merata dan serentah di seluruh desa di Indonesia, salah satunya juga dilaksanakan di desa Paya Peunaga.

Dengan adanya program seperti ini, memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan lingkungan desa. Masyarakat sangat dibantu dan diringankan bebannya dengan adanya subsidi dan program-program bantuan seperti ini. Sehingga, kondisi mereka berangsur membaik jauh dari kondisi mereka sebelumnya.

Di samping itu, program yang telah dijalankan juga telah melalui prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan adri hasil wawancara

yang telah peneliti lakukan dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga telah sangat efektif dilakukan.

#### **b. Kecukupan**

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator kecukupan bisa dilihat melalui ketepatan pelaksanaan program sesuai atau tidak dengan permasalahan yang sedang terjadi. Sebagai contoh, Desa Paya Peunaga adalah perwakilan dari seluruh desa yang ada di Aceh Barat yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan ke seluruh desa, termasuk kedua desa tersebut. Bantuan yang diberikan adalah melalui pelaksanaan program SDGs Desa. Bantuan ini salah satunya berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan berlangsungnya program ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan di Aceh Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sejauh ini penerapan dan pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga terbilang sangat tepat sasaran. Artinya, pemerintah desa memberikan program yang tepat untuk mengatasi kemiskinan di desa tersebut. Hal ini juga selaras dengan tujuan SDGs Desa nasional yaitu sebagai program yang fokus bergerak memajukan Indonesia dengan mengatasi kemiskinan di setiap daerah.

Sejauh ini, program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga melalui program BLT dan Bansos belum sepenuhnya dapat dikatakan telah

memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa anggota masyarakat mengatakan bahwa pemerintah desa belum melakukan pendistribusian BLT dan Bansos secara merata karena masih adanya warga yang belum mendapatkan BLT dan Bansos. Meskipun, prosedur dan pelaksanaan program BLT dan Bansos telah dilakukan, masyarakat merasa pemerintah desa perlu mengetahui dan mempelajari lebih lanjut terkait pihak-pihak yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, bantuan yang telah diberikan dapat dikatakan telah meringankan beban setiap anggota masyarakat. Masyarakat mendapatkan pemenuhan dari segi pangan sembako dan dana bantuan. Meskipun adanya protes dari pihak masyarakat, mereka mengharapkan agar proses pemberian bantuan dapat dilakukan secara adil dan merata.

### **c. Pemerataan**

Pemerataan merupakan bahwa kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Indikator pemerataan artinya mencoba untuk melakukan transformasi atau mendistribusikan secara merata kepada objek yang disasar. Dalam hal ini biasanya kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan dan kejujuran. Kebijakan ini biasanya ditemukan dalam bentuk pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, indikator pemerataan juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan indikator pemerataan ini, peneliti telah menuangkan dalam pedoman wawancara yang peneliti lakukan di Desa Paya Peunaga. Peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan SDGs Desa diterapkan pada desa tersebut. Apakah program SDGs Desa dilakukan dan disebarakan secara merata pada masyarakat desa atau sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti himpun dalam dapat diketahui bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga sudah dilakukan dengan baik. Artinya, pelaksanaan program SDGs Desa ini telah dilakukan secara merata kepada masyarakat di desa tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, di balik meratanya pendistribusian program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga, ternyata masih ditemukan bahwa masyarakat kurang terlibat aktif dalam menjalankan program SDGs Desa tersebut. Namun, informan lainnya ikut menjelaskan bahwa masyarakat telah diajak kerjasama untuk bermusyawarah terlebih dahulu agar pelaksanaan program SDGs Desa berjalan dengan lancar.

Di balik lancarnya program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga seperti yang telah disampaikan oleh aparatur desa, masyarakat menilai bahwa tugas dan kinerja aparatur desa sudah terbilang baik, namun perlu dilakukan pengecekan kelayakan terlebih dahulu. Masyarakat merasa pendistribusian BLT dan Bansos belum secara optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa anggota keluarga yang belum mendapatkan hal bantuan. Sehingga, masyarakat meminta agar aparatur desa dapat melakukan pemantauan terlebih dahulu kategori keluarga yang berhak menerima BLT dan Bansos.

#### **d. Responsivitas**

Responsivitas merupakan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Melalui indikator responsivitas ingin melihat bagai tanggapan dan respon pemerintah daerah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Apakah sejauh ini program SDGs Desa sudah menjawab kegelisahan dan kebutuhan masyarakat di Desa Paya Peunaga. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Hasil yang didapatkan adalah pemerintah desa di Desa Paya Peunaga telah sangat baik dalam merespon kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa berupa untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dengan cara menerapkan program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga. Hal ini menjadi salah satu cara terbaik untuk merespon kebutuhan urgensi masyarakat.

Melalui respon yang tanggap ini, program SDGs Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat melawan kemiskinan dan kelaparan. Di samping itu, program SDGs Desa juga menjadi program pemerintah yang telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat saat berada dalam masa sulit melawan Covid-19. Program SDGs Desa ini diharapkan menjadi salah satu program desa yang dapat dilakukan secara berkelanjutan ke depan nanti.

Selanjutnya, program SDGs Desa ini ternyata mendapatkan perhatian khusus dari dunia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* dijelaskan bahwa

tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di manapun lokasinya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai menaruh fokus penting memajukan Indonesia secara merata dimulai dari memajukan perkembangan desa.

Tidak hanya tanggap, berlangsungnya program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga juga harus mengedepankan keadilan. Artinya, masih ada dari anggota masyarakat yang merasa bahwa program yang dijalankan aparat desa telah optimal tetapi belum merata dengan baik. BLT dan Bansos masih ditemukan didistribusikan kepada kategori keluarga yang mampu. Padahal, masih ada beberapa keluarga yang kategori tidak mampu. Hal ini perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu kategori keluarga yang berhak menerima BLT dan Bansos. Sehingga, tidak terjadinya kesalahpahaman di lingkungan desa di kemudian hari.

#### **e. Ketetapan**

Ketetapan merupakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah “kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Memutuskan suatu program atau kegiatan layak atau tidak adalah dengan cara melakukan evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan secara langsung kepada masyarakat di Desa Paya Peunaga Peunaga terkait pelaksanaan program SDGs Desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti himpun dapat diketahui bahwa setiap narasumber yang peneliti wawancarai

menunjukkan jawaban yang sama. Sejauh ini, masyarakat sudah dilibatkan dalam proses pengenalan SDGs Desa. Masyarakat juga diajak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pendistribusian BLT dan Bansos. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilibatkan di setiap acara/kegiatan/rapat yang dilakukan oleh aparatur desa guna melaksanakan program SDGs Desa.

Di balik keaktifan dan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada program SDGs Deas, mereka menyebutkan bahwa pelaksanaan program SDGs Desa sudah dilakukan dan dijalan dengan baik. Namun, prosedur yang dilakukan masih terbilang kurang layak. Mereka menyebutkan bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SDGs Desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang layak menerima. Bahkan, salah seorang di antara mereka menjelaskan bahwa pemerintah desa belum mampu melihat siapa saja anggota masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga, mereka merasa kurang puas dengan pelaksanaan program SDGs Desa. Hal ini dikarena pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disepakati oleh masyarakat.

Jika dilihat dari respon masyarakat di atas peneliti merasa ada hal yang perlu diperhatikan secara serius. Peneliti melihat bahwa belum adanya sinergitas dan keselerasan antara jawaban yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Secara umum mungkin program SDGs Desa sudah direalisasikan dan dari kedua pihak yaitu pemerintah desa di Desa Desa Paya Peunaga dan masyarakat di desa tersebut mengakui bahwa progam SDGs Desa telah dilaksanakan. Tetapi, dampak dari program

SDGs Desa relative berbeda antara pememrintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa mengatakan telah berupaya dengan baik dalam menjalan SDGs Desa dan telah melibatkan masyarakat. Sedangkan, dari kalangan masyarakat mengatakan bahwa belum merasa puas atas terlaksananya program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga.

Melihat hasil evaluasi ini, peneliti menduga bahwa ada hal yang perlu ditinjau terkait pelaksanaan program SDGs Desa, baik dari segi pemerintah desa maupun dari segi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat untuk memajukan bangsa Indonesai bebas dari kemiskinan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Gerakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia. Program ini dihadirkan sebagai jawaban untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Tidak hanya itu, program ini juga ingin mengangkat kualitas Negara dimulai dari struktur kecil, yaitu desa. Pemerintah Indonesia mempunyai harapan besar untuk mewujudkan Desa bebas dari kemiskina, kelaparan, *stunting*, peduli perempuan, lingkungan dan nilai budaya. Oleh karena itu, desa menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia untuk dibina dengan baik agar menghasilkan tujuan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia.

Di samping itu, pelaksanaan program SDGs Desa sebetulnya sudah di jalan di seluruh desa di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti berfokus Desa Paya Peunaga. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa program SDGs Desa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah/aparatur desa. Setiap kegiatannya dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku dan juga ikut melibatkan masyarakat guna ikut mensukses program SDGs Desa ini.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, program SDGs Desa juga harus dilakukan evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini akan dinilai apakah program SDGs Desa telah berjalan dengan lancar atau tidak. Oleh karena itu, terkait pelaksanaan evaluasi diperlukan beberapa indikator evaluasi, yaitu *efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas* dan

*ketetapan*. Efektivitas, SDGs Desa di Desa Paya Peunaga telah dilakukan dan diupayakan sebaik mungkin. Sehingga, terlaksananya program dapat dikatakan efektif. Kecukupan, program SDGs Desa di Desa Paya Peunaga dilakukan secara tepat pada khalayak masyarakat yang membutuhkan. Pemerataan, SDGs Desa di Desa Paya Peunaga telah diberikan secara merata kepada masyarakat yang ditargetkan. Responsivitas, pemerintah/aparatur desa telah merespon kondisi dengan tanggap yaitu dengan menghadirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketetapan/kelayakan, SDGs Desa di Desa Paya Peunaga masih terbilang kurang layak dilakukan karena masyarakat belum measa puas dengan pelayanan yang diberikan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa antara pemerintah desa dengan masyarakat belum adanya sinergitas yang kuat. Artinya, kedua pihak belum kuat untuk saling membahu. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat diteruskan untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya. Kemudian, peneliti juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan peninjauan ulang bersama dengan aparatur desa terkait pelaksanaan program SDGs Desa, khususnya di Desa Paya Peunaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- arham, I., Sjaf, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadama Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.14710/Jil.17.2.245-255>
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Desa Peduli Lingkungan*. (N.D.).
- Handayani, Soewarno. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Pt. Gunung Agung.
- Hasanuddin, U. (2021). *Prosiding Simposium Nasional Viii Kelautan Dan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 5 Juni 2021* 267. 267–276.
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.22146/Jpt.43802>
- Iskandar, A. H. (2020). *Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Kementerian Desa, P. D. T. Dan T. (N.D.). Sdgs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan – Sdgs Desa. In *Sdgsdesa.Kemendesa.Go.Id*. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-des-no-1-des-tanpa-kemiskinan/>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. (2020). Sdgs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan. In *Sdgsdesa.Kemendesa.Go.Id*. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-des-nomor-2-des-tanpa-kelaparan/>
- Pangestu, D. A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Sumatera Selatan*.
- Purwadi. (2021, Januari 19). *Desa Jatilor*. Retrieved November 20, 2021, From [Desajatilor.Grobogan.Go.Id](https://desajatilor.grobogan.go.id): <https://desajatilor.grobogan.go.id/2-berita-terbaru/165-sdgs-des-pengertian-tujuan-dan-sasaran>
- Sdgs. (2017). Tujuan Sdgs. In *Sdgs*.
- Sdg Tanpa Kelaparan*. (N.D.). <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-2>
- Surya, R. Z. (2019). Analisa Keselarasan Sdgs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Selodang Mayang*, 5(2), 79–84.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Keterlibatan Warga Negara Di Desa Sompang Kolang Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi Dengan Memproduksi Gula Aren. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 23–33.
- Yunginger, R., & Dako, A. (N.D.). *Jurnal Sibermas ( Sinergi Pemberdayaan Masyarakat ) Strategi Program Kampung Iklim Berbasis Bottom Up Participative Dalam Mendorong Pencapaian Target Sdgs Di Desa Hutadaa Desa Hutadaa Merupakan Salah Satu Desa Yang Ada Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten G.*

## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### Efektifitas

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa guna menjalankan sdgs desa dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan?
2. Apa saja program program yang dilakukan oleh pemerintah desa guna menjalankan SDGS desa dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan?
3. Bagaimana efektivitas dari berjalannya program program tersebut dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan?
4. Apa saja perbedaan maupun perubahan yang dirasakan dari sebelum dan sesudah program ini berjalan?

### Kecukupan

1. bagaimana kecukupan pangan masyarakat di desa ini setelah program sdgs ini berjalan?
2. Apakah bantuan yang di salurkan kepada masyarakat telah mampu untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan?
3. Apakah sejauh ini ada protes atau rasa ketidakpuasan masyarakat tentang sdgs maupun penggunaan dana desa?

### Responsivitas

1. Bagaimana respon pemerintah desa tentang keluhan masyarakat terkait program sdgs dan penyaluran bantuan?

### Pemerataan

1. Apakah dana bantuan telah tersalurkan kepada masyarakat miskin dengan merata?

### Ketetapan

1. Apakah masyarakat ikut serta dalam musyawarah terkait pengenalan program sdgs desa?
2. Bagaimana proses penentuan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Amriadi (Kaur Perencanaan Desa Paya Peunaga)



Wawancara Bersama Riska Mayanti, SE (Kaur Penataan Desa Paya Peunaga)



Wawancara Bersama **Deni Yuliansyah ( Kaur Keuangan Desa Paya Peunaga)**



Wawancara Bersama **Emas Suryani S.Pd (Kasi Pelayanan Desa Paya Peunaga)**



**Wawancara Bersama Ibu Maisarah ( Masyarakat Desa Paya Peunaga)**



**Wawancara Bersama Ibu Yulia (Masyarakat Desa Paya Peunaga)**



Wawancara Bersama **Ibu Hasma (Masyarakat Desa Paya Peunaga)**